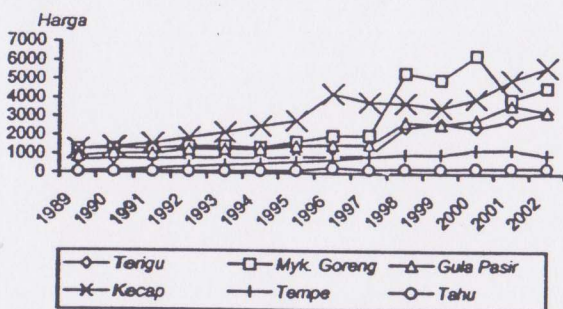


PENDAHULUAN

Berdasarkan pengamatan, setiap tahunnya harga komoditi pangan di Kota Palembang selalu mengalami kenaikan berkisar antara 30-45 persen per tahun, namun kenaikan ini tidak begitu menyokok dan tidak pernah melebihi 100 persen (*rigid upward*). (Gambar 1). Namun, kenaikan harga ini relatif tidak diimbangi dengan kenaikan daya beli masyarakat, justru daya beli masyarakat cenderung turun dan berdampak pula pada turunnya jumlah permintaan. Dalam mekanisme pasar, kurangnya permintaan ini secara teoritis akan menyebabkan harga akan terdorong turun. Akan tetapi kenyataan malah sebaliknya. Justru kurangnya permintaan mendorong terjadinya kenaikan harga. Kelompok-kelompok komoditi inilah yang menurut *Means* digolongkan sebagai kelompok komoditi yang mengalami ketegaran harga (*price rigidity*). (Hasibuan, 1993: 149)



Sumber: BPS Propinsi Sumatera Selatan dan Data Lapangan 2002

Gambar 1. Trend Harga beberapa Komoditi Pangan di Kota Palembang, Palembang, 1989-2002

Ada banyak faktor yang turut berpengaruh terhadap pembentukan harga beberapa komoditi pangan hasil industri pengolahan di Kota Palembang. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, perlu disimak kembali rantau kegiatan ekonomi pada masing-masing komoditi. Secara garis besar, ada tiga kegiatan utama dalam mata rantai ekonomi, yaitu produksi, distribusi (transportasi) dan konsumsi. Distorsi yang muncul pada salah satu kegiatan atau beberapa kegiatan sekaligus akan berpengaruh terhadap pembentukan harga komoditi.

Sebagai ilustrasi, para pedagang di pasar sering beralasan bahwa kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok selain disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku, biaya transport, juga disebabkan oleh stok yang

menipis lantaran gagal panen. Hal ini menunjukkan bahwa ada distorsi di sisi produksi (naiknya biaya bahan baku dan gagal panen) serta distorsi di sisi distribusi (naiknya ongkos transportasi). Contoh lain, beberapa barang kebutuhan pokok harganya cenderung turun. Masuknya impor barang kebutuhan pokok ditengarai menjadi penyebabnya. Jumlah pasokan yang bertambah, meskipun ongkos transportasi naik, membuat harga di pasar justru mengalami penurunan. (Jasmina, 2002: 146). Akan tetapi, satu hal selalu terjadi bahwa untuk menjaga perekonomian tetap stabil, peran pemerintah tetap dipertahankan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan produsen dan konsumen.

Biasanya, bentuk campur tangan pemerintah ini tidak secara langsung terhadap harga. Campur tangan bisa dilakukan dengan memberikan proteksi, baik dalam bentuk tarif, pembatasan kuota impor dan sebagainya. Sebagai ilustrasi, penetapan kuota impor merupakan bentuk campur tangan pemerintah secara tidak langsung terhadap harga. Implikasinya, pemegang lisensi akan dapat menentukan harga jual produk impor di dalam negeri, sehingga penentuan harga tidak dilakukan melalui mekanisme pertemuan *demand* dan *supply*, sehingga harga yang terjadi seringkali bersifat kaku (*rigid*).

Dengan melihat kecenderungan yang terjadi pada harga-harga beberapa komoditi pangan hasil industri pengolahan dan berdasarkan uraian pada latar belakang, maka tujuan penulisan ini adalah: 1). Untuk Mengetahui berapa besar tingkat ketegaran harga (*price rigidity*) komoditi pangan hasil industri pengolahan di Kota Palembang; 2). Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab ketegaran harga komoditi pangan hasil industri pengolahan di Kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Ketegaran Harga: Means

Konsep ketegaran harga dari *Gardiner C. Means* dinyatakan sebagai *administered prices*. Konsep ini muncul ketika dilakukan pengamatan terhadap beberapa komoditi yang menunjukkan gejala-gejala harga yang tidak fleksibel pada masa depresiasi ekonomi pada tahun 30-an. Berdasarkan hasil pengamatannya terhadap perkembangan indeks harga perdagangan besar dengan kelompok barang tahun 1926-1938, *Means* menemukan ada dua perkembangan utama, *pertama*: adanya perkembangan tingkat harga yang tidak fleksibel yang disebut sebagai perkembangan *administered prices*, *kedua*: perkembangan indeks

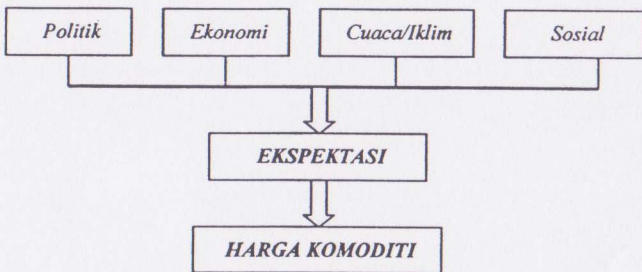
harga yang ditentukan melalui mekanisme pasar yang terbentuk dari interaksi antara penjual dan pembeli. (Means dalam Hasibuan, 1993: 153). Means berpendapat bahwa ketegaran harga disebabkan oleh adanya kekuatan pasar (*market power*) dari individu perusahaan, akibat oleh monopoli atau struktur oligopoli dalam industri. Akibatnya akan terjadi pemusatan kekuatan ekonomi di tangan beberapa orang yang bertindak untuk mengendalikan harga.

Pemusatan kekuasaan ekonomi di tangan beberapa orang cenderung menyebabkan terjadinya konsentrasi dan menurut Means hal ini akan menjadi penyebab ketegaran harga. Perusahaan yang memasuki pasar akan semakin besar dan struktur pasar dari tahun ke tahun akan mengalami perubahan dari struktur yang kecil menjadi struktur besar yang semakin terkonsentrasi. Sebagai konsekuensi lanjutannya, akan terjadi harga administratif, sedangkan harga administratif ini menentukan ketegaran harga. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan waktu, muncul argumen yang lebih beragam. Ketegaran harga tidak hanya disebabkan oleh adanya tingkat konsentrasi industri, akan tetapi juga oleh biaya input dan jenis produk. Produk pertanian relatif lebih fleksibel dari pada harga produk industri pengolahan. Produk pertanian relatif lebih cepat rusak dan sangat dipengaruhi iklim bila dibandingkan dengan produk industri pengolahan. Disamping cepat rusak dan dipengaruhi iklim, bagi petani (kecil) lebih fleksibel dalam mengatur ongkos produksi daripada industri pengolahan (besar), karena industri pengolahan (besar) lebih tergantung pada lembaga keuangan lainnya.

Dalam teori ekonomi terkandung hukum-hukum permintaan dan penawaran, di mana jumlah yang ditawarkan akan sama besar dengan jumlah yang diminta. Jika tidak sama, maka kekuatan pasar akan bertindak melakukan keseimbangan. Dengan adanya ketegaran harga, maka hukum ini menjadi tidak relevan. Ekonom John Kenneth Galbraith, berpendapat bahwa dalam kondisi pasar persaingan, tidak mungkin harga menjadi tetap dan tegar. (Hasibuan, 1993: 154). Sebaliknya tidak mungkin pasar persaingan terjadi pada saat permintaan berkurang, tetapi harga tetap, kecuali produsen bersifat *diskresioner*. Dengan kata lain, produsen ingin mempertahankan labanya, sehingga harga yang terbentuk bukan lagi melalui mekanisme pasar, karena produsen memiliki kekuatan untuk mengatur pasar.

Analisis Fluktuasi Harga

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan harga., diantaranya tingkat ekspektasi. Tingkat ekspektasi ini tidak secara langsung berpengaruh terhadap pembentukan harga.



Sumber: Akhmad Bayhaqi; Thia Jasmina, 2002. Tinjauan Triwulan Perekonomian Indonesia

Gambar 2. Skema Mekanisme Pembentukan Harga

Ekspektasi ini dibentuk oleh beberapa faktor seperti inflasi, nilai tukar, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dan situasi keamanan sosial politik. Dampaknya pada perilaku produsen dan konsumen cukup signifikan. Sehingga berperan besar terhadap pembentukan harga pada akhirnya. Secara singkat, mekanisme pembentukan harga dapat dilihat pada skema di atas: (Bayhaqi dan Jasmina, 2002: 146-149). Sebagai salah satu ilustrasi, kenaikan harga BBM merupakan salah satu bentuk distorsi yang mendorong naiknya ongkos transportasi dan distribusi. Pada saat yang bersamaan, kenaikan harga BBM juga mendorong kenaikan pada biaya produksi barang dan hal ini akan mendorong kenaikan harga jual barang di pasar. Kecenderungan yang berlaku, dampak kenaikan BBM ini terhadap harga komoditi akan terus bertahan. Sederhananya, pada saat terjadi kenaikan harga BBM, maka harga komoditi akan terdorong untuk naik, karena BBM merupakan salah satu komponen biaya input pada industri. Saat harga terdorong untuk naik, maka harga akan sulit untuk kembali pada posisi awal atau dengan kata lain harga akan tetap pada posisi barunya. (*Price Rigidity*).

Penelitian Terdahulu

Hasibuan, 2001, dalam penelitiannya mengenai ketegaran harga menemukan adanya konsentrasi penguasaan pasar, yang sekaligus mencerminkan konsentrasi penguasaan harga produktif. Bentuk-bentuk konsentrasi ini menjelma menjadi struktur monopoli/monopsoni dan oligopoli/oligopsoni. Struktur pasar yang sedemikian ini dengan mudah menciptakan ketegaran harga. Dampak perilaku ini akan semakin parah bila si monopolis menguasai pula bahan baku yang dibutuhkan oleh industri hilir. Misalnya industri semen sangat dibutuhkan sebagai bahan baku oleh industri barang dari semen, seperti tegel, batako, genteng, beton, saniter. Ketegaran harga yang dihasilkan oleh industri monopoli dan oligopolis telah menjalar jauh ke hilir, sehingga mempersulit tarif efektif turun.

Hasibuan, 2001, dalam penelitiannya mengenai Rintangan Perdagangan dan Ketegaran Harga, menyatakan bahwa secara global berbagai rintangan perdagangan masih terjadi. Namun demikian, berbagai negara juga sedang melakukan pembenahan untuk dapat bersaing ke pasaran internasional. Perdagangan internasional masih berfungsi sebagai mesin pertumbuhan di berbagai negara yang sedang berkembang dan negara maju. Rintangan-rintangan tersebut antara lain telah menimbulkan ketegaran harga yang dapat merintang arus investasi, oleh karena tingkat inflasi cenderung meningkat.

Lebih jauh lagi, Hasibuan menemukan untuk komoditi tepung terigu di Palembang memperlihatkan ketegaran harga yang terjadi pada komoditi ini (koefisien variasinya 42), disebabkan oleh dua hal, yakni bergabungnya kekuatan pengaturan dari pemerintah dan kekuatan monopolistik. Dari aspek pertumbuhan dan inovatif, struktur monopoli dan oligopoli dapat memberikan sumbangan dalam pembangunan. Namun demikian, kehadirannya telah dibayar mahal oleh konsumen dalam bentuk subsidi implisit dari konsumen. Perkiraan tahun 1987, setiap tahun konsumen telah memberi subsidi implisit kepada produsen minyak sawit sekitar Rp. 105 milyar, sedangkan gula pada tahun 1992 sebesar Rp. 82 milyar. Artinya, ukuran ini dapat dijadikan tolok ukur dari kerugian-kerugian konsumen akibat struktur pasar monopoli, baik oleh BUMN maupun swasta. (Hasibuan, 2001: 54).

Saccharina, 1987, pada penelitiannya tentang ketegaran harga komoditi Kerupuk di Sumatera Selatan selama periode 1975-1986 dengan melihat perkembangan indeks harga menemukan bahwa tingkat harga kerupuk kualitas

ekspor bukanlah ditentukan secara administrasi, melainkan melalui mekanisme pasar karena adanya fluktuasi harga yang terjadi. Terjadinya penurunan harga pada beberapa periode selama 1975-1986 lebih disebabkan oleh depresi ekonomi yang terjadi. Depresi tersebut mengakibatkan turunnya permintaan yang diiringi juga oleh penurunan harga. Kenaikan harga menyolok yang terjadi dari tahun 1977 sebesar 81,3 (indeks harga) menjadi 140,5 pada tahun 1978 lebih disebabkan oleh adanya kebijakan devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pada bulan Nopember 1978, yang mengakibatkan nilai Rupiah menurun terhadap dollar. Sementara untuk beberapa periode selanjutnya terjadi pertumbuhan harga yang negatif untuk tahun 1976 (-23,0); 1977 (-147,1); 1979 (-684,1); 1981 (-56,7) dan 1986 (-66,7). Pada tingkat pertumbuhan negatif ini berarti terjadi penurunan harga pada komoditi kerupuk di Sumatera Selatan.

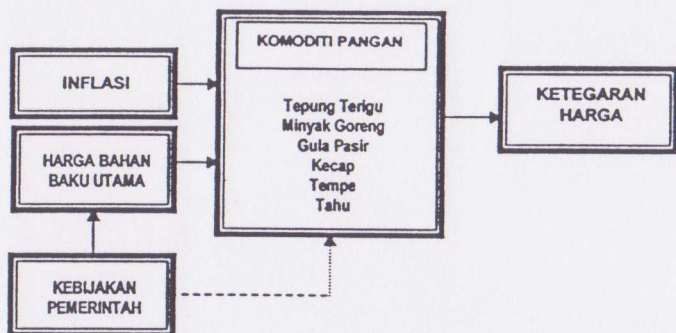
Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga komoditi kerupuk kualitas ekspor di Sumatera Selatan pada periode 1975-1986 tidak dapat dikatakan tegar. Karena terjadi penurunan harga yang sangat drastis pada masa-masa depresi dan dapat dikatakan bahwa harga komoditi kerupuk ini ditentukan oleh mekanisme pasar. (Saccharina, 1987: 5-7).

Sementara Hudaya, 1987, dalam tulisannya tentang Analisis Perkembangan Harga Terigu di Kotamadya Palembang tahun 1978-1987 dengan melihat perkembangan indeks harga terigu menemukan perubahan harga terigu yang selalu naik ini menunjukkan adanya ketegaran harga pada komoditi terigu. Hal ini lebih dimungkinkan karena terigu adalah bahan makanan pokok. Sehingga harganya selalu ditetapkan oleh pemerintah melalui kebijaksanaan harga dan stok pangan untuk melindungi konsumen dan produsen. Dengan demikian, untuk komoditi terigu terdapat *administered prices*, yaitu harga yang ditetapkan secara administrasi bukan oleh mekanisme pasar.

Sementara Adji, 1996, melakukan penelitian mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi Industri dan Penyesuaian Harga terhadap subsektor industri terpilih 5 digit. Subsektor industri yang diamati adalah minyak goreng, mie, rokok, sepatu, *furniture*, plastik, *automobil*, elektronika, keramik didasarkan pada kontribusi terhadap indeks harga yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, menemukan bahwa subsektor industri dengan konsentrasi tinggi cenderung mengalami penyesuaian harga yang lebih cepat dibandingkan dengan subsektor industri dengan konsentrasi rendah tidak terkonsentrasi.

Alur Pikir

Beranjak dari alur fikir dapat dijelaskan bahwa variabel bahan baku dan inflasi akan berpengaruh terhadap ketegaran harga komoditi pangan di Kota Palembang. Sementara variabel kebijakan pemerintah di sektor pangan diletakkan sebagai variabel kontrol yang juga berpengaruh terhadap ketegaran harga melalui efek yang diberikan, baik langsung terhadap komoditi maupun secara tidak langsung kepada bahan baku komoditi pangan.



Gambar 3. Model Kerangka Fikir Ketegaran Harga Komoditi Pangan Industri Pengolahan di Kota Palembang

Berdasarkan kerangka fikir tersebut dapat disusun kesimpulan sementara sebagai berikut:

1. Terdapat tingkat ketegaran harga yang berbeda antar komoditi pangan hasil industri pengolahan di Kota Palembang.
2. Ketegaran harga komoditi pangan hasil industri pengolahan di Kota Palembang disebabkan oleh inflasi pada sektor industri pengolahan dan harga bahan baku utama.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan cakupan permasalahan yang diambil, maka penelitian ini dibatasi pada analisa mengenai ketegaran harga untuk komoditi pangan hasil industri pengolahan selama periode 1989-2002. Komoditi yang menjadi pengamatan adalah enam komoditi pangan yang dianggap cukup mewakili. Komoditi pangan tersebut antara lain terigu, minyak goreng, gula pasir, kecap, tempe dan tahu yang secara eksplisit dikontrol oleh pemerintah.

Terdapat beberapa alasan mengapa penulisan ini hanya mengambil enam komoditi pangan. Alasan *pertama*: komoditi pangan ini merupakan dalam bagian sembilan bahan kebutuhan pokok yang sifatnya relatif penting untuk dipenuhi oleh konsumen; *kedua*: komoditi pangan ini merupakan komoditi utama, di samping komoditi lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat, utamanya masyarakat di kota Palembang; *ketiga*: adanya suatu kewajiban yang mendorong untuk melakukan analisa terhadap harga barang kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data yang bersifat sekunder (trend harga) dan primer. Adapun proses pengumpulan data skunder tersebut adalah melalui: *pertama*, melakukan pencarian, pencatatan dan menganalisa data yang berhubungan dengan masalah ketegaran harga. Data-data yang dipakai antara lain tentang produksi beberapa industri di Sumatera Selatan, perkembangan unit usaha dan tenaga kerja per cabang industri kecil pengolahan di kota Palembang, perkembangan harga beberapa komoditi pangan di kota Palembang (periode 1989-2003), perkembangan investasi dan nilai produksi pada industri pangan, jumlah permintaan komoditi pangan hasil industri pengolahan, perkembangan harga bahan baku dan produksi industri pengolahan, kondisi industri kecil pangan, Produk Domestik Regional Bruto (harga berlaku dan konstan) Sumatera Selatan, inflasi subsektor industri pengolahan, inflasi nasional dan regional kota Palembang, yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Primkopti Palembang, Bank Indonesia serta data-data lain yang dianggap cukup relevan dengan penulisan.

Kedua: pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan melakukan pencarian, pencatatan dan pengolahan data dari berbagai referensi lain yang bersumber dari majalah/jurnal penelitian, media massa (surat kabar), buletin ilmiah, buku-buku dan literatur-literatur serta makalah/hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penulisan ini.

Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap responden, dalam hal ini produsen maupun penyalur komoditi yang diamati, dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan tidak menentukan jumlah sampel yang diamati. Hasil dari pengamatan lapangan ini akan digunakan sebagai penguat argumen dan sekaligus *cross check* terhadap hasil analisa menggunakan data skunder.

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk melihat perkembangan indeks harga komoditi pangan hasil industri pengolahan dan perkembangan inflasi sektor industri pengolahan secara perbandingan rangkaian waktu (*comparison time in-series*), sehingga nantinya diharapkan akan dapat diikuti gerakan atau perubahan harga komoditi pangan tersebut selama periode 1989-2003. Selanjutnya akan dihitung koefisien variasi untuk melihat perbandingan ketegaran harga antar komoditi pangan.

1. *Indeks Harga Komoditi Pangan*. : (Dajan, 1987: 224)

$$IH = \frac{PK_{t+1}}{PK_t} \cdot 100 \dots\dots\dots (1)$$

keterangan: IH = indeks harga
 PK_t = harga komoditi periode awal t
 PK_{t+1} = harga komoditi periode berikutnya

2. *Koefisien Variasi Harga Komoditi Pangan*: (Hasibuan, 1982: 190)

$$KV = \frac{SD_i}{RIH_i} \cdot 100\% \dots\dots\dots (2)$$

keterangan :KV = Koefisien Variasi
 SD_i = Standar Deviasi komoditi-i
 IH_i = Indeks Harga komoditi-i

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketegaran harga komoditi pangan hasil industri pengolahan, digunakan teknik kuantitatif deskriptif. Metode analisis yang digunakan antara lain:

1. *Model Regresi Linier Berganda* :

Model regresi berganda untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan ketegaran harga komoditi pangan hasil industri pengolahan di Kota Palembang sebagai berikut:

$$HK_i = \alpha + \beta_1 INF + \beta_2 BK + e_i \dots\dots\dots (3)$$

keterangan: HK_i = harga komoditi - i
 INF = inflasi
 BK = harga bahan baku
 α,β = parameter yang akan diestimasi
 e_i = kesalahan pengganggu (*error term*)

Selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap model untuk mengetahui apakah terjadi hubungan yang bersifat interdependen antar variabel independen (*multikoliniritas*). Untuk keperluan ini akan dibentuk model baru yang merupakan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$BK_i = \alpha + \beta_3 INF + e_i \quad \dots\dots\dots (4)$$

Jika antara variabel Inflasi (INF) dan Harga Bahan Baku (BK) terjadi hubungan yang cukup berarti (korelasi > 50%), maka akan dilakukan perbaikan model dengan melihat rasio koefisien-koefisien tersebut:

$$\beta_3/\beta_2 = p \quad \dots\dots\dots (5)$$

Kemudian persamaan (3) akan dirubah menjadi:

$$HK_i = \alpha + \beta_2 BKI + e_i \quad \dots\dots\dots (4)$$

Dalam hal ini $BKI = (INF + p.BK)$, dan dengan cara ini akan ditaksir nilai β_2 .

2. Simulasi Kebijakan

Dalam analisis simulasi ini, secara umum pembahasan akan melihat pengaruh kebijakan pada sisi produksi dan harga bahan baku dan komoditi pangan yang diamati. Aplikasi simulasi ini adalah untuk melihat perubahan yang terjadi pada harga komoditi pangan dan bahan bakunya, di mana peubah-peubah penjelas yang lain diasumsikan tidak berubah pada nilai tertentu.

Adapun kriteria yang digunakan untuk evaluasi model yang digunakan adalah dengan melihat persentase perubahan pada sisi penawaran (produksi dan harga) komoditi dan bahan baku serta permintaan komoditi per tahun. (Djaenudin dan Gonarsyah, 2002: 28-29)

Adapun batasan operasional variabel yang digunakan antara lain:

Industri, secara mikro adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen atau barang-barang yang sifatnya saling mengganti. Sedangkan secara makro, industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. (Hasibuan, 1991: 12)

Industri Pengolahan Pangan adalah industri yang melakukan proses produksi pengolahan komoditi pangan. (Kamaluddin, 1998: 10)

Komoditi Pangan adalah komoditi yang dihasilkan, baik oleh sektor pertanian maupun perkebunan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga

menghasilkan komoditi baru yang relatif bersifat tahan lama. (Dinas Pertanian, 2003)

Ketegaran Harga adalah harga barang-barang atau jasa yang tidak fleksibel atau harga yang memiliki frekuensi perubahan yang relatif rendah dan tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri pada kondisi keseimbangan bila terjadi perubahan pada posisi permintaan dan penawaran. (Landsburg dan Feinstone, 1993: 398)

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. (Roswita, 1994: 100). Inflasi yang diamati adalah inflasi sektor industri pengolahan yang diukur dengan menggunakan angka Deflator Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dan berlaku 1983 dan 1993.

Bahan baku utama adalah bahan yang sifatnya mendasar (primer) digunakan dalam proses produksi barang dan jasa oleh perusahaan atau industri. (BPS, 2002)

Harga bahan baku utama adalah harga yang dikeluarkan/dibayarkan, baik dalam bentuk pembelian bahan baku maupun harga bahan baku itu sendiri untuk melakukan produksi barang dan jasa. (BPS, 2000)

Indeks Harga adalah perbandingan biaya dari sekumpulan khas barang konsumen (consumer goods) dan jasa pada saat ini dibandingkan dengan biaya selama periode dasar. (Dajan, 1987: 225)

Koefisien Variasi adalah perbandingan standar deviasi harga dengan rata-rata harga dari masing-masing komoditi. Koefisien ini digunakan untuk membandingkan deretan data yang mempunyai skala pengukuran yang berbeda (Srivastava, 1995: 92-93), akan tetapi dalam penelitian ini, koefisien variasi lebih diarahkan untuk melihat perbandingan antara ketegaran harga yang terjadi untuk masing-masing komoditi pangan.

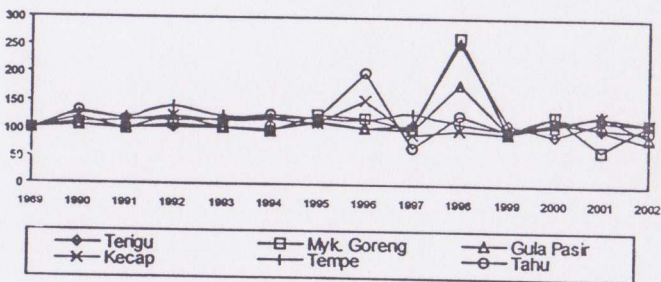
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketegaran Harga Komoditi Pangan Hasil Industri Pengolahan di Kota Palembang

Berdasarkan pengamatan, selama periode 1989-2002, terlihat bahwa hampir semua komoditi pangan hasil industri pengolahan menunjukkan gejala ketegaran harga. Hal ini terlihat dari perkembangan indeks harga komoditi pangan, beberapa periode indeks harga tidak mengalami perkembangan yang

berarti (relatif tegar). Hanya pada periode tertentu indeks harga meningkat tajam, seperti pada tahun 1998. Kondisi ini terjadi karena pada periode tersebut terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan harga-harga seluruh komoditi melambung tinggi. Akan tetapi untuk periode selanjutnya, kembali harga menunjukkan gejala untuk tegar. (Gambar 4).

Ada beberapa penyebab mengapa harga komoditi tepung terigu ini relatif tegar, *pertama*, sebagian besar terigu dan bahan baku terigu masih didatangkan dari luar. Hal ini berdampak pada biaya angkut dan pajak yang relatif mahal, sehingga harga komoditi terigu menjadi sulit untuk turun (berubah-ubah). Situasi perdagangan tepung terigu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala peningkatan impor yang besar. Untuk tepung terigu, kecenderungannya sangat mengkhawatirkan. Apabila tahun 2001 impor terigu mencapai 256.000 metrik ton, maka pada tahun 2002 mencapai 336.000 metrik ton (APTINDO, 2002). Hal ini mengakibatkan pangsa industri terigu mengalami penurunan sekitar 8,26% tahun 2002. Sedangkan pangsa tepung terigu impor meningkat sebesar 8,89%. Hampir seluruh kebutuhan terigu ini didatangkan dari Australia (80%), sedangkan sisanya dari Amerika, Canada, Perancis, Belgia, Argentina, New Zealand, dan Hungaria. Di sisi lain, Indonesia sudah terkenal sebagai negara pengimpor gandum terbesar terbesar di Asia Tenggara, sehingga ketergantungan impor tidak dapat dihindarkan lagi. Hal ini sedikit banyak turut menyumbang terhadap ketegaran harga yang terjadi pada komoditi terigu.



Sumber: Diolah

Gambar 4. Perkembangan Indeks Harga Komoditi Pangan Hasil Industri Pengolahan di Kota Palembang, 1989-2002

Kedua, bergabungnya kekuatan pengaturan dari pemerintah dan kekuatan monopolistik, sehingga harga terigu di Palembang relatif tegar. Kekuatan pemerintah tercermin dari kebijakan yang dikeluarkan, baik berupa pajak impor maupun pengaturan tata niaga impor. Komoditi terigu dan bahan baku untuk terigu (gandum) ini termasuk salah satu komoditi yang diatur tata niaga impornya, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 230/MPP/Kep/7/97 mengenai tata niaga impor terigu yang ditangani oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal ini ditujukan untuk memperlancar arus pengadaan barang, menjamin kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri.

Akan tetapi, karena adanya gabungan kekuatan monopolistik, maka harga yang berlaku bukan lagi dibentuk melalui mekanisme pasar, akan tetapi lebih kepada mekanisme administratif. Sebagaimana diketahui, di masa lalu monopoli impor gandum dan industri pengolahannya dilakukan oleh PT. Bogasari yang hingga kini masih menguasai pangsa pasar terigu domestik hingga 75 persen. Kondisi ini menyebabkan perdagangan gandum dan terigu mengalami situasi pasar yang tidak bersaing sempurna. Hak monopoli telah menyebabkan antara lain PT. Bogasari menjadi konglomerat yang menguasai industri hilir dan hulu. Di samping, kebijakan pemanfaatan bantuan asing dalam kerangka PL480 (bantuan kredit jangka panjang) telah memicu masuknya impor gandum secara besar-besaran di awal tahun 1970-an.

Sementara untuk komoditi gula, ketegaran harga yang terjadi pada komoditi ini ada kaitannya dengan tantangan dan yang dihadapi oleh industri gula domestik, antara lain: *pertama*: Kebijakan Proteksi yang berupa tarif, pajak, subsidi maupun hambatan non tarif. Pada tabel 1, terlihat bahwa tarif impor gula pasir dari tahun 1988 sampai dengan 1999 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1988 hanya sebesar empat persen/kuintal menjadi 20 persen/kuintal pada tahun 1999.

Jika dicermati, naiknya tarif impor gula pasir ini tidak mutlak menyebabkan volume impor gula pasir berkurang. Kenaikan tarif diiringi dengan kenaikan volume impor gula pasir. Pemerintah menerapkan tarif spesifik Rp. 700/kg. Indonesia masih memiliki potensi swasembada gula. Kapasitas *idle* PG saat ini mencapai 43 persen dari 200 ribu ton tebu per hari. Sementara produktivitas saat ini rata-rata 5 ton gula/ha. (Ismail, 2002: 26-30).

Tabel 1
Perkembangan Bea Masuk dan Impor Gula Pasir Indonesia, 1988-1999

Tahun	Bea Masuk (%/kuintal)	Impor Gula Pasir \$ (ton)
1988	4	150.000
1989	4	200.000
1990	6	235.000
1991	8	239.000
1992	9	242.000
1993	10	248.000
1994	12	257.000
1995	14	265.000
1996	14	391.000
1997	17	580.000
1998	18	973.000
1999	20	1.083.000

Sumber: Disperindag Propinsi Sumatera Selatan

Kedua: adanya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) ikut menyumbang terhadap tegarnya harga gula pasir. Menurut Amrullah, (2003), dalam dua puluh tahun terakhir industri gula domestik mengandung ekonomi biaya tinggi. Amrullah menghitung bahwa DRCR (*Domestic Resources Cost Ratio*) untuk industri gula adalah antara 1 – 2. Nilai ini menunjukkan bahwa produksi gula secara ekonomi tidak memiliki keunggulan komparatif. Rata-rata biaya produksi pabrik gula di Jawa adalah Rp. 1.100/kg, sementara di luar Jawa dengan sistem Hak Guna Usaha (HGU) biaya produksinya sekitar Rp. 500 - 600/kg. Hal ini terkait dengan rendahnya efisiensi pabrik gula tersebut; *Ketiga:* inefisiensi dalam industri gula. Industri gula di Indonesia pada tahun 1930-1940 tergolong paling efisien di dunia, ditunjukkan dengan produktivitas yang sangat tinggi ketika itu yakni 17,63 ton hablur/ha dengan rendemen 12,79 persen. (Mackie dan O'Malley, 1988). Hal ini dapat dibandingkan dengan produktivitas pada periode 1990-1998 yaitu 5,42 ton hablur/ha dengan rendemen 7,3 persen. (DGI, Bulog, 1998).

Keempat: lamanya waktu giling. Terdapat *economic of scale* dalam industri pengolahan tebu. Dengan demikian, bagi pabrik gula memperpanjang waktu giling dapat meningkatkan skala produksinya. Permasalahannya sekarang, umur pabrik gula yang ada relatif sudah tua sehingga kemampuan teknisnya tidak optimal untuk menggiling tebu. Sekitar 23 persen atau 16 PG berusia di atas 150 tahun. (Tabel 2). Karena tuntutan untuk memperoleh keuntungan, biasanya masa giling diperpanjang. Akibat lahan dan suplai tebu yang terbatas, maka ada sebagian PG mendapat tebu secara penuh dan sebagian ada yang tidak penuh. Hal seperti ini akan mempengaruhi suplai gula di pasaran. Sehingga terjadi kelebihan

permintaan yang mendorong terjadinya kenaikan harga gula pasir. Pada saat terjadi kenaikan harga ini, maka harga yang baru akan relatif lambat menyesuaikan diri dengan perubahan pada posisi keseimbangan semula. Sehingga harga yang terjadi lebih sering diatur oleh pemerintah, bukan melalui mekanisme pasar.

Tabel 2
Distribusi Pabrik Gula Menurut Umur dan Kapasitas Giling

Usia Pabrik Gula	Jumlah Pabrik Gula	Persen
1. > 150 tahun	16	23
2. 100 – 150 tahun	22	32
3. 75 – 100 tahun	9	13
4. 25 – 75 tahun	11	15
5. < 25 tahun	12	17
<i>Total</i>	70	100
<i>Kapasitas Giling (TCD)</i>		
1. < 3.000 TCD	45	64
2. 3.000 – 6.000 TCD	20	29
3. > 6.000 TCD	5	7
<i>Total</i>	70	100

Sumber: Siagian dalam Amrullah (2003)

Keterangan : TCD = *Ton Cane per Day*

Untuk komoditi minyak goreng selama periode 1989-2002 menunjukkan gejala yang relatif tegar. (Gambar 4). Tercatat perkembangan indeks harga rata-rata minyak goreng sebesar 9,6 persen pertahun. Selain kebutuhan pokok, minyak goreng juga merupakan komoditi andalan untuk ekspor. Dengan perannya yang demikian penting dalam perekonomian nasional, maka kenaikan harga akan dapat memicu terjadinya inflasi. Ketidak stabilan dalam pasar minyak goreng lebih disebabkan oleh berkurangnya pasokan dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi.

Ketegaran harga pada komoditi minyak goreng ini sendiri tidak lepas dari peran pemerintah dalam tindakan melakukan kontrol harga. Pada tahun 1978, pemerintah mengeluarkan keputusan tentang pengadaan minyak nabati dalam negeri yang menetapkan jumlah alokasi bahan baku minyak kelapa sawit dari masing-masing produsen untuk masing-masing unit pabrik minyak goreng dan industri lain yang menggunakan bahan baku minyak nabati. Kebijakan tersebut mengharuskan 35 persen dari produksi minyak sawit dialokasikan untuk kebutuhan domestik dan selebihnya dapat diekspor. Kemudian kebijakan penetapan pajak ekspor ini diganti dengan kebijakan pasar bebas untuk *crude palm oil* (CPO) dan minyak kelapa pada bulan Juni 1991, dan kemudian diubah kembali dengan SK Menteri Keuangan No. 439/KMK.017/1994 tentang pajak

ekspor. Menurut keputusan tersebut, pajak ekspor ditentukan secara progresif sesuai dengan tingkat harga ekspor yang berlaku, berkisar antara 40-60 persen untuk CPO dan 50-75 persen untuk minyak goreng sawit.

Dari tabel 3 terlihat bahwa berkali-kali pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan ditinjau melalui pengumuman Keputusan Menteri. Akan tetapi tampaknya ketentuan-ketentuan ini dirasakan kurang efisien. Pada Pakjun 1991, pemerintah mutuskan pajak ekspor untuk bahan menjadi nol persen. Hal ini lebih dimungkinkan harga minyak sawit di pasaran internasional mengalami penurunan. Malahan Indonesia mengimpor CPO sebesar 2.997.130 metrik ton atau sekitar US\$ 456.385 juta. Tetapi ketentuan mengimpor ini dibatasi lagi dengan ketentuan bea masuk. Hal ini untuk menjaga supaya impor tidak berlebihan. Hal seperti ini juga menjadi pendorong terjadinya kekakuan harga komoditi minyak goreng.

Tabel 3

Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Tingkat Pajak Ekspor dan Pajak Ekspor Tambahan untuk Bahan Baku dan Minyak Goreng, 1984-1999

Urutan Kep. Menteri	Tentang	Besar Pajak Ekspor (%)			
		CPO	RBDPO	CCO	RBDKO
47 / 1984	PE	5,00	-	-	-
48 / 1984	PET	37,18	-	0,00	-
171 / 1985	PE	5,00	-	5,00	-
28 / 1989	PE	10,00	-	5,00	-
PAKJUN 1991	PE/PET	0,00	-	0,00	-
439 / 1994	PE	40-60	50-57	-	-
300 / 1997	PE	5,00	4,00	-	-
622 / 1997	PET	30,00	30,00	-	-
242 / 1998	PE	40,00	30,00	20,00	15,00
334 / 1998	PE	60,00	55,00	20,00	15,00
30 / 1999	PE	40,00	32,00	15,00	10,00
189 / 1999	PE	30,00	22,00	0,00	0,00
360 / 1999	PE	10,00	6,00	0,00	0,00

Sumber : Diolah dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Diperindag Propinsi Sumatera Selatan

Di samping itu belum efisiennya pabrik minyak goreng menjadi pemicu terjadinya ketegaran harga. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1984 harga CPO dalam negeri dinaikkan menjadi 46 persen, karena sebagian besar PTP tidak mungkin memperoleh keuntungan dengan tingkat harga Rp. 292 per kg CPO. (Hasibuan, 1993: 249). Ini mengindikasikan pemerintah berupaya memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang lemah. Namun di sisi lain, perlindungan ini justru menekan konsumen. Karena bila diukur dengan kinerja perusahaan swasta, mereka dapat memperoleh dengan harga yang lebih murah. Dengan kata lain,

subsidi yang dibreikan pada produsen CPO tidak memberikan dampak yang berarti bagi rumah tangga.

Untuk komoditi tempe selama periode 1989-2002 harga komoditi tempe hampir tidak pernah mengalami penurunan. Tercatat selama periode tersebut pertumbuhan harga relatif tinggi dengan rata-rata pertahun sebesar 17,9 persen. Hampir tidak pernah menurunnya harga komoditi tempe ini mengindikasikan adanya gejala ketegaran (Gambar). Frekuensi perubahan tidak terlalu sering terjadi selama periode 1989-2002. Dalam periode pengamatan selama 1989-2002 frekuensi perubahan harga hanya terjadi 3-4 kali. Bila disetarakan dengan kategori Means dalam mengamati harga beberapa komoditi pada tahun 1929-1933, di mana perubahan indeks harga yang terjadi antara 0-7 kali digolongkan komoditi yang memiliki ketegaran harga. Maka dapat digolongkan bahwa komoditi tempe ini adalah komoditi yang mengalami ketegaran harga.

Penyebab ketegaran harga pada komoditi tempe ini terutama disebabkan antara lain oleh: *pertama*: Tegarnya harga bahan baku kedelai yang sebagian besar masih diimpor dari Amerika Serikat dan Kanada. Sebagian kecil lainnya merupakan produksi lokal petani dari daerah Lampung dan Sumatera Barat. Produsen tempe biasanya lebih menyukai kedelai impor dalam membuat tempe, karena menurut mereka hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kedelai lokal.

Kedua: Kebijakan pemerintah juga turut menyumbang terhadap pembentukan harga komoditi tempe. Kedelai ini termasuk komoditi yang diatur tata niaga impornya oleh pemerintah melalui Bulog. Hal ini ditujukan untuk memperlancar arus pengadaan barang. Pengaturan tata niaga impor ini telah menyebabkan impor kedelai meningkat dari tahun 1989 sebesar 21.501 ton menjadi 3.788 ton pada tahun 2002, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,6 persen per tahun. Hal-hal seperti ini sedikit banyak akan berperan dalam membentuk ketegaran harga komoditi tempe.

Di samping komoditi tempe yang menggunakan bahan baku dari kedelai, komoditi kecap juga menggunakan kedelai sebagai bahan bakunya. Bila disimak pada gambar 4 terlihat bahwa komoditi kecap di Kota Palembang juga mengalami ketegaran dalam harga. Terlihat selama periode 1989-2002, harga komoditi kecap tumbuh sebesar 11,3 persen pertahun. Meski terlihat bahwa perkembangan harga cukup berfluktuasi, akan tetapi bila dilihat dari indeks perkembangan harga

ternyata frekuensi perubahan harga komoditi ini juga relatif kecil antara 4-6 kali per tahun selama periode 1989-2002.

Berdasarkan ciri-ciri yang ada, industri kecap tergolong industri yang berstruktur persaingan monopolistik. Dilihat dari berbagai jenis kecap yang tersebar di pasar, terlihat ada semacam substitusi yang erat, tetapi tidak sempurna, antar produk kecap, karena tiap komoditi memiliki ciri tersendiri yang merupakan kelebihan masing-masing komoditi. Hal ini menunjukkan bahwa industri kecap di Palembang adalah industri persaingan monopolistik yang melakukan diferensiasi produk. Dalam struktur pasar ini, harga komoditi biasanya berubah bilamana terdapat perubahan besar pada biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku dengan cepat dapat dialihkan pada kenaikan harga produk.

Ketegaran harga pada komoditi kecap ini juga terutama disebabkan oleh:

1). Naiknya harga bahan baku utama kedelai. Mengingat kedelai ini masih di impor dari luar negeri, maka tidak mengherankan apabila harga kedelai sulit turun. Hal ini berdampak pada kenaikan harga komoditi kecap yang menggunakan bahan baku kedelai tersebut. Bila berbicara mengenai impor bahan baku, tentu tidak dapat melepaskan peran pemerintah di dalamnya. Kebijakan pemerintah terhadap komoditi kecap ini sama halnya dengan kebijakan pada komoditi tempe yang lebih diarahkan pada bahan baku kedelai; dan 2). Komoditi kecap adalah komoditi yang bersifat tahan lama, sehingga frekuensi perubahan harga menjadi relatif jarang terjadi. Tercatat selama periode 1989-2002 frekuensi perubahan harga hanya terjadi 3-4 kali per tahun. (Gambar 4). Hal ini mengindikasikan bahwa kecap adalah komoditi yang harganya tergolong tegar.

Selain komoditi tempe dan kecap yang menggunakan bahan baku kedelai, komoditi tahu juga menggunakan kedelai sebagai bahan baku dalam proses produksinya. Pada gambar 4 terlihat bahwa perkembangan harga komoditi tahu terlihat cukup berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 13,7 persen. Meski demikian, bila diamati perubahan indeks harga komoditi terlihat bahwa komoditi tahu memiliki tingkat ketegaran harga yang relatif besar dengan frekuensi perubahan 3-4 kali per tahun.

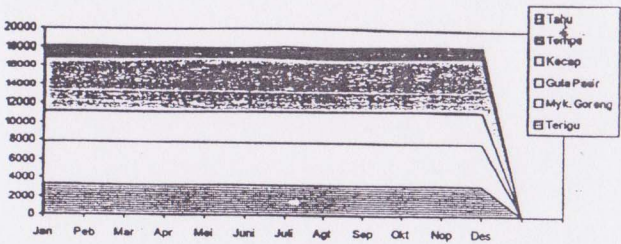
Penyebab ketegaran harga komoditi tahu di Kota Palembang ini sama halnya dengan penyebab ketegaran harga pada tempe dan kecap, karena ketiga komoditi menggunakan bahan baku yang sama. Adanya kekuatan pengaturan dari pemerintah terhadap bahan baku sedikit banyak akan berpengaruh terhadap ketegaran harga yang terjadi pada komoditi tahu di Kota Palembang.

Koefisien Variasi Komoditi Pangan Hasil Industri Pengolahan di Kota Palembang, 1989-2002

Bila diamati secara cermat, dengan melihat trend harga perbulan komoditi Terigu, Minyak Goreng, Gula Pasir, Kecap, Tempe dan Tahu di Kota Palembang selama tahun 2002. Terlihat bahwa pertumbuhan harga masing-masing komoditi sebesar nol persen per bulan atau hampir tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini mungkin lebih spesifik menggambarkan perubahan harga komoditi tersebut. Terlihat pada gambar 5 hampir semua komoditi pangan yang diamati tidak mengalami perubahan harga selama bulan Januari – Desember 2002.

Sepintas lalu, kondisi ini menunjukkan adanya kestabilan harga pada komoditi pangan ini. Harga yang stabil mungkin lebih diartikan pada harga yang terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan (*equilibrium price*). Pada saat harga keseimbangan terbentuk dan harga relatif cepat menyesuaikan diri pada saat terjadi perubahan pada kedua besaran tersebut, maka harga dikatakan stabil. Kestabilan bukan berarti harga tetap tidak mengalami perubahan (naik atau turun), akan tetapi lebih ditekankan pada kemampuannya menyesuaikan diri dengan segera terhadap perubahan permintaan dan penawaran.

Agaknya trend yang berlaku untuk komoditi pangan di Kota Palembang adalah harga yang relatif tegar. Hal ini tercermin dari ketidakmampuan harga menyesuaikan dengan segera pada saat terjadi perubahan pada sisi permintaan. Hal tersebut telah dijelaskan pada bagian terdahulu, saat membandingkan antara produksi dan permintaan komoditi. Terlihat untuk beberapa komoditi yang sifatnya *urgan* untuk dipenuhi, seperti terigu, gula pasir dan minyak goreng. Permintaan selalu lebih tinggi daripada produksi. Kelebihan permintaan ini mendorong terjadi kenaikan harga. Hal ini tidak terjadi bila harga dengan segera menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Justru pada saat terjadi kelebihan permintaan, harga komoditi tersebut meningkat.



Sumber: BPS Propinsi Sumatera Selatan, 2002 (Diolah)

Gambar 5. Trend Harga per Bulan Komoditi Pangan Hasil Industri Pengolahan di Kota Palembang, 2002 (Rp/kg)

Bila dicermati kembali, pada gambar 5 terlihat bahwa frekuensi perubahan harga komoditi yang diamati relatif kecil, tercatat selama Januari – Desember 2002 frekuensi perubahan hanya berkisar antara 1-6 kali perbulan untuk seluruh komoditi. Bila dikembalikan pada batasan yang telah dibuat oleh Means, dimana perubahan indeks harga komoditi yang berkisar antara 1-16 kali dikategorikan komoditi yang memiliki harga yang tegar. Maka, komoditi pangan di Kota Palembang termasuk kategori komoditi yang memiliki harga yang tegar.

Melihat dari koefisien variasi dari perkembangan indeks harga komoditi pangan hasil industri pengolahan di Palembang, terlihat ada beberapa komoditi yang mempunyai koefisien variasi yang relatif tinggi (di atas 50%). Secara keseluruhan, dengan melihat pada koefisien variasi keseluruhan komoditi pangan ini, dapat dikatakan bahwa adanya kecenderungan terjadinya ketegaran harga yang semakin meningkat. (Lihat tabel 4).

Tabel 4
Koefisien Variasi Beberapa Indeks Harga Komoditi Pangan di Kota Palembang, 1989-2002 (%)

Komoditi	KOVAR
Terigu	62,20
Minyak Goreng	63,52
Gula Pasir	48,06
Kecap	43,13
Tempe	57,06
Tahu	52,02

Sumber: Diolah

Dengan membandingkan tingkat ketegaran harga antar komoditi, diperoleh koefisien variasi untuk komoditi terigu, minyak goreng, tempe, dan tahu relatif lebih tinggi (di atas 50%), dibandingkan dengan koefisien variasi gula

pasir dan kecap. Ini Artinya, keempat komoditi tersebut memiliki tingkat ketegaran yang relatif tinggi dibandingkan dengan komoditi gula pasir dan kecap.

Berdasarkan uraian ini dapat diambil kesimpulan mendasar antara lain: 1). Adanya indikasi perbedaan dalam komposisi permintaan untuk komoditi yang sifatnya *urgen* untuk selalu dipenuhi, seperti terigu, minyak goreng dan gula pasir dibandingkan dengan komoditi yang tidak *urgen* sifatnya untuk selalu dipenuhi, seperti tempe, kecap dan tahu. Hal ini terlihat dari jumlah permintaan yang selalu berada di bawah produksi komoditi tersebut. Seyogyanya, dengan kondisi seperti ini harga akan cepat menyesuaikan diri (menurun) dengan perubahan pada posisi keseimbangan. Akan tetapi yang terjadi justru harga relatif tetap untuk berubah. Implikasi fenomena ini dalam proses pembangunan ekonomi, bila dilihat secara makro, harga akan cenderung terus meningkat sehingga mendorong turunnya permintaan. Artinya semakin lemahnya permintaan efektif. Dalam kondisi demikian, menurut mekanisme pasar, maka tingkat harga cenderung menurun (*ceteris paribus*), tetapi dalam kenyataannya cenderung terjadi tingkat harga terus meningkat, dengan kata lain telah terjadi ketegaran harga; 2). Ketegaran harga yang terjadi pada komoditi pangan hasil industri pengolahan di Kota Palembang antara lain disebabkan karena naiknya harga bahan baku dan sisi kebijakan pemerintah yang dirasakan kurang efektif dalam mengatasi distorsi pasar serta adanya kekuatan monopoli dalam pasar yang juga turut menyumbang kepada distorsi harga; dan 3). Melihat dari koefisien variasi komoditi pangan hasil industri pengolahan di Kota Palembang, terlihat bahwa ada beberapa komoditi yang memiliki ketegaran yang relatif tinggi dibandingkan dengan komoditi lainnya. Meski demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa ketegaran harga komoditi pangan di Kota Palembang terbilang besar (tinggi).

Analisis Faktor Penyebab Ketegaran Harga Komoditi Pangan di Kota Palembang, 1989-2002

Perkembangan harga komoditi terigu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku dan inflasi yang terdongkrak karena harga bahan baku. Berdasarkan hasil analisa regresi sederhana dengan menggunakan dua variabel, harga komoditi terigu (variabel dependen) dan harga bahan baku terigu yang telah digabungkan dengan inflasi sektor industri pengolahan (variabel independen) diperoleh nilai β sebesar 0,279. Hal ini menunjukkan bahwa bila harga bahan

baku meningkat sebesar satu persen, maka harga komoditi akan meningkat sebesar 27,9 persen.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 69,9 persen menunjukkan besarnya sumbangan variabel bahan baku terhadap variasi (naik turunnya) harga komoditi adalah sebesar 69,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 30,1 persen disebabkan oleh faktor lain. Sedangkan koefisien korelasi (R) sebesar 83,6% menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup erat antara harga bahan baku dengan harga komoditi terigu. Dengan kata lain ada hubungan yang positif antara harga bahan baku terigu dengan harga komoditi terigu.

Dilihat dari nilai elastisitas dengan mendasarkan pada kriteria yang digunakan oleh Dajenudin dan Gonarsyah (2002: 30-33), bahwa nilai elastisitas yang kurang dari satu mencerminkan tingkat responsifitas yang lemah antara dua variabel yang diamati. Terlihat bahwa nilai elastisitas terigu adalah sebesar 0,836, ini artinya harga komoditi terigu relatif kurang responsif terhadap harga bahan baku terigu. Hal ini mengindikasikan bahwa, meski dalam jangka pendek industri terigu telah terintegrasi dengan bakunya, akan tetapi dalam jangka panjang produksi terigu akan sangat tergantung pada akses dari industri tersebut terhadap bahan baku yang diperlukan serta tingkat ekspektasi masyarakat.

Untuk gula pasir, berdasarkan hasil analisa regresi sederhana dengan menggunakan dua variabel, harga komoditi gula pasir (variabel dependen) dan harga bahan baku gula pasir (tetes tebu) sebagai variabel independen diperoleh nilai β sebesar 0,753. Hal ini menunjukkan bahwa bila harga bahan baku meningkat sebesar satu persen, maka harga komoditi akan meningkat sebesar 75,3 persen.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 43,9 persen menunjukkan besarnya sumbangan variabel bahan baku terhadap variasi (naik turunnya) harga komoditi adalah sebesar 43,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 56,1 persen disebabkan oleh faktor lain. Sedangkan koefisien korelasi (R) sebesar 66,3 persen menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup erat antara harga bahan baku dengan harga komoditi gula pasir. Dengan kata lain ada hubungan yang positif antara harga bahan baku gula pasir (tetes tebu) dengan harga komoditi gula pasir.

Dilihat dari nilai elastisitas dengan mendasarkan pada kriteria yang digunakan oleh Dajenudin dan Gonarsyah (2002: 30-33), bahwa nilai elastisitas yang kurang dari satu mencerminkan tingkat responsifitas yang lemah antara dua variabel yang diamati. Terlihat bahwa nilai elastisitas gula pasir adalah sebesar

0,663, ini artinya harga komoditi gula pasir relatif kurang responsif terhadap harga bahan baku tetes tebu. Hal ini juga mengindikasikan bahwa, meski dalam jangka pendek industri gula pasir telah terintegrasi dengan bakunya, akan tetapi dalam jangka panjang produksi gula pasir juga akan sangat tergantung pada akses dari industri tersebut terhadap bahan baku yang diperlukan serta tingkat ekspektasi masyarakat. Hal ini diakibatkan kenyataan bahwa berapapun tingkat harga bahan baku tetes tebu yang berlaku, produsen tidak dapat dengan segera langsung mengubah produksinya.

Berdasarkan hasil analisa regresi sederhana dengan menggunakan dua variabel, harga komoditi minyak goreng (variabel dependen) dan harga bahan baku minyak goreng (CPO) sebagai variabel independen diperoleh nilai β sebesar 1,693. Hal ini menunjukkan bahwa bila harga bahan baku meningkat sebesar satu persen, maka harga komoditi minyak goreng akan meningkat sebesar 163,9 persen.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 57,8 persen menunjukkan besarnya sumbangan variabel bahan baku terhadap variasi (naik turunnya) harga komoditi adalah sebesar 57,8%, sedangkan sisanya sebesar 42,2 persen disebabkan oleh faktor lain. Sedangkan koefisien korelasi (R) sebesar 76,0 persen menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup erat antara harga bahan baku dengan harga komoditi minyak goreng. Dengan kata lain ada hubungan yang positif antara harga bahan baku minyak goreng (CPO) dengan harga komoditi minyak goreng.

Dilihat dari elastisitas, nilai elastisitas minyak goreng adalah sebesar 0,760, ini artinya harga komoditi minyak goreng relatif kurang responsif terhadap harga bahan baku CPO. Hal ini juga mengindikasikan bahwa, sebagian besar industri minyak goreng ini telah terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit sebagai penyedia bahan bakunya.

Berdasarkan hasil analisa regresi sederhana dengan menggunakan dua variabel, harga komoditi kecap (variabel dependen) dan harga bahan baku kecap (kedelai) sebagai variabel independen diperoleh nilai β sebesar -0,123. Hal ini menunjukkan bahwa bila harga bahan baku meningkat sebesar satu persen, maka harga komoditi minyak goreng akan turun sebesar 12,3 persen. Ini artinya ada korelasi yang negatif antara harga kedelai dengan harga kecap. Terdapat penjelasan lain yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini. Tanda negatif pada parameter β menunjukkan adanya semacam substitusi bahan baku pengganti untuk produksi kecap. Komoditi kecap juga dapat digolongkan produk turunan

tempe. Mungkin tidak secara umum, akan tetapi pembuatan kecap dapat dilakukan dengan menggunakan air *kemanyu* yang merupakan hasil limbah pembuatan tempe. (Primpkopti, 2004). Sehingga sepintas terlihat bahwa komoditi kecap tidak begitu responsif terhadap harga bahan baku kedelai.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 10,4 persen menunjukkan besarnya sumbangan variabel bahan baku kedelai terhadap variasi (naik turunnya) harga komoditi kecap adalah sebesar 10,4 persen, sedangkan sisanya sebesar 89,6 persen disebabkan oleh faktor lain. Sedangkan koefisien korelasi (R) sebesar 32,2 persen menunjukkan derajat keeratan hubungan antara harga bahan baku dengan harga komoditi kecap.

Dilihat dari elastisitas, nilai elatisitas kecap sebesar $-0,322$, ini artinya harga komoditi kecap kurang responsif terhadap harga bahan baku kedelai. Hal ini juga mengindikasikan bahwa, industri kecap belum begitu terintegrasi dengan dengan bahan bakunya, sehingga dalam jangka pendek kebutuhan akan bahan baku tidak selalu tersedia. Sedangkan dalam jangka panjang produksi kecap ini akan sangat tergantung pada akses industri kecap terhadap bahan baku yang diperlukannya.

Berdasarkan hasil analisa regresi sederhana dengan menggunakan dua variabel, harga komoditi Tempe (variabel dependen) dan harga bahan baku tempe (kedelai) sebagai variabel independen diperoleh nilai β sebesar 1,527. Hal ini menunjukkan bahwa bila harga bahan baku meningkat sebesar satu persen, maka harga komoditi tempe akan meningkat sebesar 152,7 persen. Ini artinya ada korelasi yang positif antara harga kedelai dengan harga tempe.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 42,9 persen menunjukkan besarnya sumbangan variabel bahan baku kedelai terhadap variasi (naik turunnya) harga komoditi tempe adalah sebesar 42,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 57,1 persen disebabkan oleh faktor lain. Sedangkan koefisien korelasi (R) sebesar 65,5 persen menunjukkan derajat keeratan hubungan antara harga bahan baku dengan harga komoditi tempe.

Dilihat dari elastisitas, nilai elatisitas tempe sebesar 0,655, ini artinya harga komoditi tempe relatif kurang responsif terhadap harga bahan baku kedelai. Hal ini juga mengindikasikan bahwa, produsen/industri tempe sudah terintegrasi dengan dengan bahan bakunya, sehingga dalam jangka pendek kebutuhan akan bahan baku akan selalu tersedia. Sedangkan dalam jangka panjang produksi

tempe akan sangat tergantung pada akses industri/produsen tempe terhadap bahan baku yang diperlukannya.

Berdasarkan hasil analisa regresi sederhana dengan menggunakan dua variabel, harga komoditi Tahu (variabel dependen) dan harga bahan baku tahu (kedelai) sebagai variabel independen diperoleh nilai β sebesar $-0,0089$. Hal ini menunjukkan bahwa bila harga bahan baku meningkat sebesar satu persen, maka harga komoditi tahu akan turun sebesar 0,89 persen. Ini artinya ada korelasi yang negatif antara harga kedelai dengan harga tahu.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 3,24 persen menunjukkan besarnya sumbangan variabel bahan baku kedelai terhadap variasi (naik turunnya) harga komoditi tempe adalah sebesar 3,24 persen, sedangkan sisanya sebesar 96,76 persen disebabkan oleh faktor lain. Sedangkan koefisien korelasi (R) sebesar 1,8 persen menunjukkan hubungan antara harga bahan kedelai dengan harga komoditi tahu tidak terlalu erat.

Dilihat dari elastisitas, nilai elastisitas tahu sebesar $-0,018$, ini artinya harga komoditi tahu kurang responsif terhadap harga bahan baku kedelai. Mengingat bahwa produsen tahu ini biasanya beroperasi dalam skala kecil, maka integrasi dengan bahan baku masih relatif kurang dan juga akses industri/produsen tahu terhadap bahan baku juga masih relatif lemah.

Simulasi Kebijakan di Sektor Pangan

Berdasarkan hasil analisis simulasi kebijakan pemerintah di sektor pangan terhadap pembentukan karakteristik komoditi dengan melihat sisi penawaran (produksi) komoditi maupun bahan baku, harga dan permintaan komoditi yang diamati diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Untuk komoditi terigu, skenario kebijakan sektor pangan dalam pengaturan tata niaga impor maupun pengenaan tarif bea masuk terhadap gandum, telah menyebabkan permintaan dan produksi tepung terigu meningkat sebesar 0,087 persen, akan tetapi kenaikan produksi ini juga diikuti oleh kenaikan harga yang relatif tinggi sebesar 0,118 persen.
2. Untuk komoditi gula pasir, skenario kebijakan dalam bentuk pengaturan tata niaga impor maupun pengenaan tarif bea masuk terhadap gula pasir maupun tetes tebu, menyebabkan produksi gula pasir mengalami penurunan sebesar 0,129 persen. Penurunan produksi ini diikuti oleh kenaikan harga gula pasir sebesar 0,098 persen dan kenaikan permintaan sebesar 0,068 persen.

- 3 Untuk minyak goreng, skenario kebijakan sektor pangan, baik dalam pengaturan tata niaga impor maupun pengenaan tarif bea masuk terhadap CPO, menyebabkan produksi minyak goreng meningkat relatif lambat sebesar 0,007 persen per tahun. Kenaikan produksi ini diimbangi oleh kenaikan permintaan yang relatif besar 0,068 persen. Meningkatnya dua besaran ini ternyata juga turut menyebabkan harga minyak goreng terdorong untuk naik menjadi sebesar 0,096 persen.
4. Untuk komoditi kecap, tempe dan tahu, skenario kebijakan dalam bentuk pengaturan tata niaga impor kedelai menyebabkan produksi kecap, tempe dan tahu masing-masing meningkat sebesar 0,030 persen, 0,201 persen dan 0,103 persen. Kenaikan produksi ini diikuti oleh kenaikan permintaan untuk komoditi kecap, tempe dan tahu masing-masing sebesar 0,019 persen, 0,139 persen dan 0,079 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, melihat koefisien variasi dari perkembangan indeks harga komoditi pangan hasil industri pengolahan di kota Palembang dapat dikatakan bahwa ada kecenderungan terjadinya ketegaran harga yang semakin meningkat. Faktor yang dominan menjadi penyebab ketegaran harga ini antara lain *inflasi* dan *ketersediaan bahan baku*.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model persamaan regresi sederhana diperoleh: *Pertama*: ada korelasi yang positif antara harga bahan baku dengan harga komoditi, terutama untuk komoditi terigu, gula pasir, minyak goreng dan tempe. Hal ini terlihat dari tanda parameter β yang bernilai positif. Sementara untuk harga komoditi tahu dan kecap memiliki korelasi yang negatif dengan harga bahan baku kedelai. Ini artinya ada faktor lain yang juga turut berpengaruh terhadap ketegaran harga komoditi tahu dan kecap, seperti harga barang *administered*, seperti BBM, Tarif Listrik dan ekspektasi masyarakat; *Kedua*: untuk komoditi yang ditangani pemerintah melalui kebijakan disektor pangan, baik melalui impor atau pengenaan tarif, yang langsung ke komoditi atau bahan baku cenderung bersifat responsif terhadap perubahan harga bahan baku. Sementara untuk komoditi yang diatur tata niaganya, terbatas hanya pada bahan baku, seperti kecap, tempe dan tahu cenderung kurang responsif terhadap perubahan harga bahan baku.

Sedangkan saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya serius untuk menjamin ketersediaan komoditi pangan, terutama terigu, minyak goreng, gula pasir, kecap, tahu dan tempe untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain melalui pemberian insentif kepada industri/produsen yang menghasilkan komoditi pangan tersebut berupa penurunan pajak ekspor komoditi dan peningkatan pajak ekspor bahan baku, seperti kedelai, gandum, terigu dan tetes tebu. Hal ini seyogianya ditinjau dari perspektif yang lebih luas dan berjangka panjang, yakni peningkatan nilai tambah melalui ekspor komoditi dan penurunan ekspor bahan baku (*raw materials*).
2. Penilaian terhadap kebijakan pemerintah, umumnya dititik beratkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap produsen, konsumen dan lembaga pemasaran serta pemerintah sendiri. Oleh karena itu, mekanisme kontrol dari pemerintah selaku pembuat kebijakan harus lebih diperketat untuk meminimalkan distorsi pasar yang terjadi sebagai akibat sampingan dari kebijakan yang diberlakukan, sehingga tidak menimbulkan berbagai kerugian dan mengganggu kontinuitas produksi nasional.
3. Diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan membedakan antara komoditi yang relatif ketat dan kurang ketat dikontrol oleh pemerintah, seperti tekstil, sabun dan sebagainya dengan turut mempertimbangkan tingkat konsentrasi pasar, ekspektasi masyarakat dan harga barang *administered* lain seperti Bahan Bakar Minyak, Tarif Listrik dan lain-lain yang ikut berpengaruh dalam proses produksi serta jangka waktu pengamatan terhadap perubahan perilaku (harga) komoditi hendaknya dipersingkat dengan mengamati perubahan perilaku (harga) harian, mingguan atau bulanan sehingga perubahannya akan lebih tergambar secara jelas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, Roswita. 1994. *Ekonomi Moneter: Teori, Masalah dan Kebijaksanaan*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Adji, Artidiatun. 1996. *Industrial Concentrations and Price Adjustment: Indonesia Case Study*. *Kelola*. No. 12/V.
- Alfred. W. S dan Hague, C. Douglas. 1983. *Teori Ekonomi*. Jilid I. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amrullah, Saberuddin. 2003. *Dinamika Industri Gula Domestik*. *Majalah Pangan, Media Komunikasi dan Bisnis*. Edisi No. 41/XII/Juli.
- Arief, Sritua. 2001. *Uang Beredar dan Inflasi*. Makalah. Jakarta: FE-UI.

- Aswicahyono, Haryo., Ardiyanto, Dionisius., dan Titik, Anas. 2001. The Source Market Performance in Indonesia's Manufacturing Industry. *The Indonesian Quarterly*, No. 1 Tahun 2001.
- A.T. Brawijaya. 1987, Ketegaran Harga untuk Timah di Sumatera Selatan. Makalah FE Unsri. tidak dipublikasikan.
- Azariadis, Costas., Cooper, Russel. 1985. Nominal Wage-Price Rigidity as a Rational Expectations Equilibrium. *American Economic Association (AEA) Papers and Proceedings*, Vol. 75 No.2.
- Azhari, Delima Haris. 2003. Reposisi Terigu dalam Pangan Masyarakat Menuju Kemandirian Pangan Nasional. *Majalah Pangan. Media Komunikasi dan Bisnis*. Edisi No. 4/XII/Juli.
- Bain, S, Joe. 1949. A Note on Pricing in Monopoly and Oligopoly. *The American Economic Review*, Vol 1, No. 2.
- Barro, Robert. J, Romer, Paul. M, 1987. Ski-Lift Pricing, with Applications to Labor and Other Market. *The American Economic Review*. Vol. 77 No. 5.
- Bayhaqi, Akhmad., Jasmina, Thia. 2002. Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok. *Analisis Triwulanan Perekonomian Indonesia*. Vol. 4 No. 2.
- Badan Pusat Statistik. Sumatera Selatan Dalam Angka 1989-2002.
- Dajan, Anto. 1987. *Pengantar Metode Statistik*. Jilid I. Jakarta: LP3ES.
- Damanhuri, Didin. S. 1996. *Ekonomi Politik Alternatif Agenda Reformasi Abad 21: Monopoli, Konglomerasi dan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- De Long, J. Bradford., Summers, Lawrence. H. 1986. Is Increase Price Flexibility Stabilizing?. *The American Economic Review*. Vol. 76 No. 5.
- De Leeuw, Frank., McKelvey, Michael. J. 1984. Price Expectations of Business Firms: Bias in the Short and Long Run. *The American Economic Review*. Vol. 74 No. 1.
- Djaenudin, R. Deden., Gonarsyah, Isang. 2002. Analisis Pasar Domestik Minyak Goreng: Dampak Kebijakan Pemerintah dan Kemungkinan Diberlakukannya Liberalisasi Perdagangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Vol. XLX N0. 1. Jakarta: LPEM FE-UI.
- Dornbusch, Rudiger. 1987. Exchange Rates and Price. *The American Economic Review*. Vol. 77 Nomor. 1.
- Ferguson., Maurice. 1978. *Economic Analysis: Theory and Application*. Third Edition. Homewood Illionois: Richard D. Irwin, Inc.
- Frans, Arthur. G., Greer, Douglas. F. 1977. Market Stucture and Price Collusion: An Empirical Analysis. *The Journal of Industrial Economics*. September. 1977.
- Goodz, Richard, 1994. Gardiner Means on Administered Prices and Adminitrative Inflation. *Journal of Economic Issues*. Vol. XXVIII. No. 1. March. 1994.
- Harzburg, Morris. 1979. *Basic Statistics*. Second Edition. New York: Harcourt Brace Javanovich. Inc.
- Hasibuan, Nurimansjah. 1987. *Ketegaran Harga dan Efisiensi*. Jakarta: Komunika.
- _____. 1989. *Pengantar Ekonometrika*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- _____. 1993. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2001. *Eksplotasi dan Distorsi*. Mimeo. Palembang: FE-Unsri.